

**TINJAUAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PADABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 - 2021**

**Tri Hartiningsih<sup>1</sup>, R.Rachmiyantono W.H<sup>2</sup>, Lis Widowati<sup>3</sup>**  
[trihartiningsih@yahoo.com](mailto:trihartiningsih@yahoo.com), [rrachmiyantono@gmail.com](mailto:rrachmiyantono@gmail.com), [liswidowati@efhar.ac.id](mailto:liswidowati@efhar.ac.id)  
**Akademi Akuntansi Effendiharahap, Semarang, Indonesia**

**Abstrak**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal mempunyai salah satu tugas untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Anggaran, Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. LKPD tersebut merupakan konsolidasian dari semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kendal. Berdasarkan LKPD, hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat diketahui dan digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan menggunakan beberapa alat analisis, maka kinerja Pemerintah Daerah dapat diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan untuk kinerja ke depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berisi mengenai profil dan program program kerja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Sedangkan data kuantitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Penelitian ini menafsirkan data dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, pandangan masyarakat terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Kendal. Hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga rasio ketergantungan semakin meningkat yang mengindikasikan ketergantungan pemerintah kabupaten Kendal terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat semakin berkurang. Mempertahankan tingkat efektifitas serta berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan.

**Kata Kunci: laporan keuangan, kinerja**

---

*Abstract*

*The Kendal Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) has one of the tasks of compiling Regional Government financial reports (LKPD) consisting of Budget Reports, Balance Sheets, Cash Flows, Operational Reports, Reports on Changes in Equity, Reports on Changes in Budget Excess Balances and Notes on Regional Financial Report. The LKPD is a consolidation of all Regional Government Work Units (SKPD) in Kendal Regency. Based on the LKPD, the performance results of the Kendal Regency Regional Government can be identified and used to evaluate and improve government performance in subsequent years. By using several analytical tools, the performance of the Regional Government can be identified and used as a consideration for future performance. This research uses qualitative and quantitative methods. Aims to explain something through a study. The qualitative data in this study contained profiles and work programs carried out by the Kendal Regency Regional Financial and Asset Management Agency. Meanwhile, quantitative data is in the form of data presented in the form of financial reports contained in the Regional Management and Asset Management Agency. This study interprets the data and describes the data related to the situation that is currently happening, the public's view of the regional financial reports of Kendal Regency. It is hoped that the results of research on the Kendal Regency Government will strive to further increase its PAD by optimizing resource management and expanding sectors that have the potential to increase PAD, so that the dependency ratio increases which indicates that the Kendal district government's dependence on revenue from the Central Government is decreasing. Maintaining the level of effectiveness and trying to improve the efficiency of regional financial management. Regional revenue realization must still be greater than the set target.s.*

**Keywords:** *Financial reports, Performance*

---

ISSN

2548-6535 (print)

2615-6784 (online)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan daerah merukan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Laporan keuangan inilah yang akan dijadikan salah satu pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah daerah yang digunakan pihak luar (DPRD dan masyarakat) dalam rangka pengambilan keputusan dan menilai penyelenggaraan Pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pengertian rasio keuangan dalam Pemerintah adalah alat untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan yang ditulia dalam laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Habibi (2015) mengemukakan otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi, pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara pemerintah yang baik (good gavermance). Akan tetapi

pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini lebih menuntut kemandirian dari daerah dalam mendanai dan melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan UU Nomer 28 Tahun 1999, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Kabupaten Kendal setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal mempunyai salah satu tugas untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Anggaran, Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. LKPD tersebut merupakan konsolidasian dari semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kendal. Berdasarkan LKPD, hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat diketahui dan digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan menggunakan beberapa alat

analisis, maka kinerja Pemerintah Daerah dapat diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan untuk kinerja ke depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2019 -2021”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Penelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal.

### **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 April 2021 – 06 Juni 2022

### **Jenis Data**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian menggunakan kedua jenis data yang telah dikemukakan diatas yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berisi mengenai profil dan program program kerja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Sedangkan data kuantitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Penelitian ini menafsirkan data dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, pandangan masyarakat terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yaitu :

1. Metode Observasi /Pengamatan Lapangan  
Metode observasi/pengamatan lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan obyek secara langsung. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai proses pelaporan keuangan pemerintah daerah
2. Metode Wawancara  
Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung dengan pihak yang sedang diamati atau seseorang yang berwenang. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal tahun 2019-2021
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah pengumpulan dan mencopy dokumen, catatan, dan lampiran terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal tahun 2019-2021 pada BPKAD. Selain itu juga mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Akuntansi Pemerintah.

### **Objek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah

Tinjauan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2021 Pada BPKAD.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah harus menyelenggarakan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima

oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan.

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis kinerja dan kondisi keuangan pemerintah. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antar komponen maupun antar laporan keuangan, serta melakukan analisis rasio (Surachman dan Handayani, 2020).

**Tabel 1. Tinjauan Independensi Derajat Otonomi Fiskal (DOF)**

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)			
$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$			
	2019	2020	2021
PAD	335.892.237.024,00	350.500.849.956,00	356.753.593.703,00
Total Pend Daerah	2.138.564.387.700,00	2.228.384.399.855,00	2.131.449.784.048,00
DOF	15,71%	15,73%	16,74%
Keterangan	Kurang	Kurang	Kurang

Derajat Otonomi Fiskal digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan mengukur kinerja keuangan, rasio ini dihitung dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan rasio 15,71% pada

tahun 2019, kemudian tahun 2020 sebesar 15,73% dan tahun 2021 menunjukkan rasio 16,74%. Berdasarkan tolak ukur yang ada, perhitungan ini menggambarkan jika kemampuan pemerintah Kendal dalam menjalankan urusan keuangannya masih tergolong kurang, mulai dari kemampuan dalam mencari sumber pendapatan hingga mengelola keuangan.

**Tabel 2. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)**

Indeks Kemampuan Rutin (IKR)			
$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100$			
	2019	2020	2021
PAD	335.892.237.024,00	350.500.849.956,00	356.753.593.703,00

Total Blj Rutin	1.519.541.578.972,00	1.671.399.149.560,00	1.490.381.849.716,00
IKR	22,10%	20,97%	23,94%
Keterangan	Sedang	Sedang	Sedang

Indeks Kemandirian Rutin merupakan indeks yang mengukur bagaimana PAD suatu pemerintah daerah dapat menutup semua kegiatan belanja rutin. Mengukur IKR dengan membandingkan PAD dengan total belanja rutin. Berdasarkan perhitungan tersebut

pemerintah kabupaten Kendal pada tahun 2019 memiliki rasio sebesar 22,10%, tahun 2020 sebesar 20,97% dan tahun 2021 sebesar 23,94%. Yang berdasarkan tolak ukur yang ada rasio tersebut menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah kendal dalam membiayai belanja rutinnya adalah sedang.

**Tabel 3. Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian			
$RKmd = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi + Pinjaman Daerah}}$ $RKmd = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Realisasi PAD	335.892.237.024,00	350.500.849.956,00	356.753.593.703,00
Total Pend Daerah	2.138.564.387.700,00	2.228.384.399.855,00	2.131.449.784.048,00
RKmd	15,71%	15,73%	16,74%
Keterangan	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya, atau dapat juga sebagai indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Berdasarkan perhitungan

Rasio Kemandirian Kabupaten Kendal Tahun 2019 sebesar 15,71%, kemudian tahun 2020 sebesar 15,73% dan tahun 2021 sebesar 16,73%. Berdasarkan tolak ukur yang ada, rasio tersebut menggambarkan kemampuan keuangan yang rendah sekali, dengan pola hubungan instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat masih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau pemerintah daerah tidak mampu mengelola otonomi daerah secara finansial.

Tabel 4. Rasio Ketergantungan

<b>Rasio Ketergantungan</b>			
	$Rktg = \frac{\text{Realisasi Transfer ke Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$		
	2019	2020	2021
Realisasi Transfer Daerah	1.711.651.103.424,00	1.777.999.309.899,00	1.668.485.487.845,00
Total Pendapatan Daerah	2.138.564.387.700,00	2.228.384.399.855,00	2.131.449.784.048,00
Rasio ketergantungan	80,04%	79,79%	78,28%

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini di dapat dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan tersebut pemerintah kabupaten Kendal pada tahun 2019 memiliki rasio sebesar 80,04%, tahun 2020 sebesar 79,94%, dan tahun 2021 sebesar 78,28%. Rasio tersebut mengindikasikan jika pemerintah kabupaten Kendal dalam pengelolaan keuangannya masih bergantung pada pemerintah pusat.

#### Rasio Keserasian (Rser)

Rasio keserasian digunakan untuk mengukur keserasian realisasi belanja (cara pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana belanja), misalnya rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja langsung. Rasio keserasian yang lebih rendah menunjukkan bahwa anggaran belanja semakin banyak dialokasikan (diprioritaskan) untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan program pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik kondisi kapasitas keuangan pemerintah daerah karena kondisi ideal adalah jika belanja

langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) lebih besar daripada belanja tidak langsung. Namun harus dipahami bahwa sampai saat ini belum ada pedoman ideal tentang besarnya rasio belanja terhadap total belanja pada APBD karena sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

#### Tinjauan Likuiditas dan

##### Solvabilitas

##### Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis apakah aset yang ada dapat dipakai untuk melunasi kewajiban entitas yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio likuiditas maka kemampuan entitas tersebut untuk melunasi kewajibannya semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, rasio likuiditas menunjukkan tren penurunan keuangannya masih bergantung pada pemerintah pusat. dari 2019 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunankinerja. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 utang

jangka pendek pemerintah mengalami peningkatan yang cukup besar yang tidak diikuti dengan kenaikan aset lancar.

### Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk menganalisis apakah suatu entitas mampu untuk melunasi seluruh hutangnya termasuk hutang jangka panjang. Semakin tinggi rasio solvabilitas, maka kemampuan untuk melunasi kewajibannya juga semakin tinggi.

Berdasarkan hasil analisis, rasio solvabilitas pemerintah

menunjukkan tren penurunan dari 2019 hingga 2021. Penurunan dari 2019 ke 2020 adalah 5,59 sedangkan penurunan dari 2020 ke 2021 terbilang cukup besar yaitu 65,73. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah dalam melunasi kewajibannya mengalami penurunan kinerja. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 utang pemerintah mengalami peningkatan yang cukup besar yang tidak diikuti dengan kenaikan aset.

**Tabel 5. Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas	2019	2020	2021
Realisasi PAD	335.892.237.024	350.500.849.956	356.753.593.703
Anggaran PAD	338.052.929.990	412.512.717.638	333.650.044.139
Refk	99,40%	85,00%	106,90%
Keterangan	Tidak efektif	Tidak efektif	Tidak efektif

### Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target (anggaran) PAD berdasarkan Potensi Riil}}$$

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan PAD dari target/potensi riilnya. Hal ini berimplikasi pada kemampuan keuangan pemerintah daerah. Rasio keuangannya masih bergantung pada pemerintah pusat, efektifitas yang dihitung dengan

melakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal terlihat fluktuatif setiap tahunnya. Namun dari ketiga tahun yang dihitung hanya pada tahun 2021 yang menunjukkan tingkat efektifitasnya di atas 100%.

**Tabel 6. Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi	2019	2020	2021
Biaya Perolehan PAD	12.708.703.952	14.387.368.417	8.646.883.134
Realisasi PAD	335.892.237.024	350.500.849.956	356.753.593.703
Refk	3,78%	4,10%	2,42%
Keterangan	Sangat Efisien	Sangat Efisien	Sangat Efisien

## Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan (Pemungutan) PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur efisiensi pemerintah daerah dalam perolehan PAD (membandingkan biaya perolehan PAD dengan realisasi PAD). Biaya perolehan PAD yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan rasio efisiensi dan menandakan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang tidak efisien. Terdapat beberapa kriteria efisiensi sesuai dengan rasio efisiensi pemerintah daerah. Kabupaten Kendal sendiri menunjukkan tingkat efisiensi yang terbilang sangat baik dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten Kendal dapat secara efisien meminimalisir biaya perolehan dalam pemungutan PAD.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas yang telah dilakukan, Berdasarkan perhitungan mengenai rasio keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal, di peroleh beberapa kesimpulan. Dari sisi independensi selama tahun 2019- 2021 dapat dikatakan Pemkab Kendal belum independen. Hal ini didasari oleh hasil analisis Derajat Otonomi Fiskal, Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Kemandirian, dan Rasio Ketergantungan yang menghasilkan kesimpulan bahwa dana transfer memiliki kontribusi besar dalam pendapatannya dibandingkan PADnya.

Berdasarkan Rasio Keserasian, Pemkab Kendal memprioritaskan belanja pada kelompok belanja tidak langsung selama tahun 2019–2021. Belanja perkapita Pemkab Kendal cenderung mengalami penurunan, hal

ini disebabkan karena penurunan realisasi belanja yang berbanding terbalik dengan jumlah pertumbuhan penduduknya. Penurunan realisasi belanja sangat banyak terjadi pada tahun terakhir dikarenakan adanya program *recofusing* anggaran selama masa pandemi covid-19.

Kemampuan Pemkab Kendal menyelesaikan kewajibannya diukur menggunakan Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas. Kemampuan Pemkab Kendal menyelesaikan kewajibannya mengalami penurunan sepanjang tahun 2019– 2021. Meskipun begitu, Pemkab Kendal tetap memiliki sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban beserta bunganya.

Efektivitas kinerja keuangan Pemkab Kendal yang diukur dengan Rasio Efektivitas mengalami presentase tidak efektif pada tahun 2019 dan 2020 sampai akhirnya menjadi efektif pada tahun 2021. Meskipun begitu untuk rasio efisiensinya mengalami presentasi yang konsisten sangat efisien tiap tahunnya di bawah 5%.

## SARAN

Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga rasio ketergantungan semakin meningkat yang mengindikasikan ketergantungan pemerintah kabupaten Kendal terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat semakin berkurang. Mempertahankan tingkat efektifitas serta berupaya

meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan.

Keuangan, Jurnal Diakses 28 September 2022

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Dalam, (2017), Buku Sistem Akuntansi Keuangan.
- Bimawan, F., Studi Akuntansi, P., & Akuntansi Effendi Harahap Semarang Abstrak, A. (2021). Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa di Kota Semarang. Edisi Oktober Management & Accountancy in Practice Journal, 2(2), 114–123.
- Hery, (2015:7), Definisi Akuntansi, Jurnal. Diakses 28 September 2022.
- Kasmir, (2019:5), Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jurnal Diakses 2 Oktober 2022
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
- Munawir, (2015), Buku Laporan Keuangan
- Moh Mamsun dkk, (2016), Buku Sistem Akuntansi Keuangan Mahmudi, (2016:19), Sistem Akuntansi Keuangan, Jurnal Diakses 28 September 2022
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan
- Septoaji, A. (2021). Peran Managerial dalam Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Serat Acitya, 10(2), 124. <https://doi.org/10.56444/sa.v10i2.2471>
- Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL. 7(February), 6. Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
- Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026
- Taswan, (2015:5), Pengertian Akuntansi, Jurnal Diakses 28 September 2022
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme